



naskah diterima: 15/05/2024, direvisi: 02/07/2024, disetujui: 13/07/2024

## **PROGRAM RUMAH PADAT KARYA PRODUKSI PAVING SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA**

**Indah Nur Septiani<sup>1</sup>, Vidya Imanuari Pertiwi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Corresponding Author: [20041010112@student.upnjatim.ac.id](mailto:20041010112@student.upnjatim.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya Produksi Paving. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu: 1) Seleksi lokasi atau wilayah dilakukan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari penetapan kriteria lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi paving. Adapun dalam hal ini juga bekerjasama dengan pihak terkait. Kecamatan Tambaksari juga memanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan lain untuk ditematkannya masyarakat Kecamatan Tambaksari. 2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilihat dari pihak Kecamatan Tambaksari bersama dengan pihak yang terlibat telah melakukan sosialisasi dengan materi terkait program padat karya paving dan informasi yang diberikan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Namun untuk menyerap tenaga kerja lagi dibutuhkan suatu strategi. 3) Proses Pemberdayaan Masyarakat belum dilaksanakan dengan maksimal. Dalam proses pemberdayaan masyarakat memang sudah dilakukan identifikasi wilayah dan kajian potensi wilayah, adanya pembentukan kelompok usaha padat karya paving meskipun dalam perekrutan anggota mengalami kendala dalam ketidaksesuaian data keluarga miskin dan ketidaktepatan sasaran keluarga miskin, adanya pelatihan dan menerapkan rencana yang telah disusun dengan dukungan fasilitas seperti pemberian modal, kelengkapan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil produksi. Setelah itu juga ada pemantauan proses dan hasil produksi. Namun dalam kelengkapan sarana dan prasarana dirasa masih kurang maksimal, mesin yang difasilitasi mesin manual sehingga membutuhkan ekstra tenaga manusia. Mesin juga sering mengalami kerusakan, sehingga menjadi salah satu faktor hasil produksi tidak bisa maksimal atau hasil tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4) Pemandirian Masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilihat dari, kelompok usaha padat karya paving masyarakat Kecamatan Tambaksari mampu untuk mengelola usahanya sendiri. Namun meskipun sudah mandiri, Kecamatan Tambaksari bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga masih selalu memantau dengan memberikan motivasi. Selain itu dari adanya program rumah Padat Karya Paving ini masyarakat Kecamatan Tambaksari juga mampu menumbuhkan keterampilannya sehingga bisa berpartisipasi mewakili event-event terkait program inovasi yang dimiliki masing-masing kota.

**Kata Kunci:** Kecamatan Tambaksari, Pemberdayaan Masyarakat, Rumah Padat Karya

**Abstract:** This research aims to describe Community Empowerment in Tambaksari District, Surabaya City through the Work-Intensive Housing Program for Paving Production. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Interviews, observation and documentation are the techniques used in collecting research data. Data analysis techniques through data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This research obtained the following results: 1) Location or area selection was carried

out optimally. This can be seen from the determination of the criteria for land assets of the Surabaya City Government that can be used as paving production land. In this case, we also collaborate with related parties. Tambaksari District also utilizes the Labor-Intensive Paving Production Houses in other Districts for the people of Tambaksari District to house them. 2) Community Empowerment Socialization has been carried out well. This can be seen from the Tambaksari District, together with the parties involved, who have carried out outreach with material related to the labor-intensive paving program and the information provided has been well conveyed to the community. However, to absorb more workers, a strategy is needed. 3) The Community Empowerment process has not been implemented optimally. In the process of community empowerment, area identification and regional potential studies have been carried out, there has been the formation of a labor-intensive paving business group, although in recruiting members there have been obstacles in the form of discrepancies in poor family data and inaccurate targeting of poor families, there has been training and implementation of plans that have been prepared with the support of facilities such as provision of capital, completeness of facilities and infrastructure as well as marketing of production results. After that there is also monitoring of the production process and results. However, it is felt that the completeness of the facilities and infrastructure is still not optimal, the machines are facilitated by manual machines so they require extra human power. Machines also often break down, so this is one of the factors that produce production results cannot be maximized or results do not comply with established standards. 4) Community self-reliance has been implemented well. This can be seen from the fact that the labor-intensive paving business group in the Tambaksari District is able to manage its own business. However, even though it is independent, Tambaksari District together with the Water Resources and Highways Service still always monitors it by providing motivation. Apart from that, through the Solid Work Paving house program, the people of Tambaksari District are also able to grow their skills so that they can participate in representing events related to innovation programs owned by each city.

**Keywords:** *Tambaksari District, Community Empowerment, Labor Intensive Houses*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah masalah serius di banyak negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang dalam (Priseptian & Primandhana, 2022). Kemiskinan adalah situasi kondisi dimana pribadi atau kelompok mendapat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan lingkungan memberikan lebih sedikit peluang untuk meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan atau menghindari kerentanan (Cahyat, 2007: 4) dalam (Adawiyah, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2022 sebanyak 26,36 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebar di Indonesia dengan terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Secara khusus, sebagian besar penduduk miskin tinggal di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin mencapai 19,34 juta jiwa per September 2022. Jumlah masyarakat miskin yang tinggal di wilayah perkotaan Jawa sebanyak 8,03 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan Jawa mencapai 5,91 juta jiwa yang sebarannya terkonsentrasi di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 4,24 juta jiwa. Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur serta sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Kota Surabaya terus mengalami perubahan di setiap tahunnya. Perubahan

tersebut antara lain pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini yang sering disebut oleh banyak masyarakat sebagai salah satu alasan untuk pindah ke Kota Surabaya. Bertambahnya pendatang dan semakin bertambahnya masyarakat asli di Kota Surabaya itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan lahan dikarenakan tidak seimbangnya antara kebutuhan dan ketersediaan lahan. Jumlah masyarakat Kota Surabaya yang termasuk kedalam kategori keluarga miskin pada tahun 2022 sebanyak 219.427 jiwa. Data penduduk yang termasuk ke dalam kategori keluarga miskin di 5 (lima) kecamatan teratas tahun 2022 diantara kecamatan lain yang ada di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Masyarakat Keluarga Miskin di 5 Kecamatan Teratas Kota Surabaya Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Data (Jiwa)
1.	Tambaksari	31.036
2.	Wonokromo	17.115
3.	Sukomanunggal	15.242
4.	Semampir	14.782
5.	Gubeng	12.547

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2023

Kecamatan Tambaksari mempunyai jumlah keluarga miskin tertinggi diantara kecamatan lain yang ada di Kota Surabaya yaitu sebanyak 31.036 jiwa. Dalam (Setijanigrum et al., 2017), Pemerintah Kota Surabaya telah mencanangkan banyak program untuk mengurangi kemiskinan. Adapun dua penyebab utama tidak efektifnya program pengurangan kemiskinan adalah yang pertama dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program serta program yang belum merepresentasikan kebutuhan kelompok miskin akan kehidupan yang bermartabat. Program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan haruslah mendukung dan memberdayakan masyarakat miskin melalui pembangunan serta peningkatan ekonomi untuk mengembangkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya pembangunan serta membangun peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang fokus pada program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu program Pemerintah Kota yang memberikan dampak nyata untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Surabaya adalah Program Padat Karya. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya

Nomor 83 Tahun 2023, Pasal 1 Ayat 19 menyatakan Padat Karya merupakan pekerjaan produktif yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat keluarga miskin melalui pendayagunaan sumber daya alam, pekerja serta teknologi lokal untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan penghasilan serta melindungi daya beli masyarakat. Pelaksanaan program padat karya akan menggunakan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya dengan prioritas diberikan kepada pekerja dari keluarga miskin yang belum bekerja. Ira Tursilowati sebagai Direktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, menyatakan seluruh aset Pemerintah Kota Surabaya berupa tanah tersebar di wilayah kota Surabaya sejumlah 64.496.98,25 Meter Persegi (m<sup>2</sup>). Sebanyak 9.555.372 m<sup>2</sup> lahan belum dikembangkan atau 15% dari total bidang tanah milik Pemerintah Kota Surabaya digunakan untuk Program Rumah Padat Karya (Hakim, 2022) dalam (Putricia & Prathama, 2023). Kategorisasi Program Rumah Padat Karya disesuaikan dengan potensi yang terdapat di masing-masing daerah.

Namun dalam penerapannya, penawaran program pemerintah ini masih banyak disia-siakan oleh banyak masyarakat. Salah satu faktornya adalah mentalitas negatif yang tumbuh di masyarakat, yaitu lebih memilih untuk bermalas-malasan, berpangku tangan menunggu bantuan dari Pemerintah Kota. Dinas Sosial Kota Surabaya mengumumkan terdapat lebih dari 219.000 masyarakat miskin di Kota Surabaya. Sebanyak 19.600 di antaranya enggan menerima tawaran pekerjaan pada Program Rumah Padat Karya, padahal program Rumah Padat Karya menargetkan 19.500 keluarga miskin dan sangat miskin (Manumoyoso, 2023).

Program Rumah Padat Karya harus dipandang sebagai bantuan dalam bentuk sumber daya produktif yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Namun, pengoptimalan memerlukan lebih dari sekedar upaya dan komitmen yang tidak instan. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu Program Rumah Padat Karya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) merupakan pelatihan pembuatan paving. Pemerintah Kota Surabaya memperoleh peringkat 1 dalam penilaian kegiatan Pemerintah Daerah di Bidang Kebinaamargaan dalam Penyelenggaraan Jalan Kategori Pemerintah Kota dari Kementerian PUPR. Pengelolaan jalan lingkungan di Kota Surabaya dilakukan dengan semangat gotong royong, sejalan dengan visi dan misi Walikota Surabaya, Eri Cahyadi

dengan salah satu programnya adalah pembuatan paving yang menyertakan masyarakat miskin Surabaya. Pada saat penjurian, juri mengamati langsung produksi paving di Rumah Padat Karya, lalu pemasangannya serta mengamati jalan yang sudah terpasang paving. Melihat hal tersebut, mereka meyakini bahwa pengerjaan jalan lingkungan di Kota Surabaya bukan hanya sekedar overlay, namun juga melalui Program Rumah Padat Karya. Mereka meyakini inovasi ini layak untuk ditiru oleh wilayah lain di Indonesia. Bahkan mereka berpendapat bahwa Program Rumah Padat Karya berbeda dengan wilayah lainnya (surabaya.go.id, 2023).

Rumah Padat Karya di Kecamatan Tambaksari tepatnya di Jalan Tambaksari No.11 menjadi Rumah Padat Karya Produksi Paving pertama kali yang didirikan di Kota Surabaya. Adi Gunita sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, menjelaskan di wilayah Kecamatan Tambaksari tepatnya di Jalan Tambaksari No.11, terdapat dua kelompok usaha padat karya paving yang pertama kali didirikan di Kota Surabaya. Pembuatan paving untuk kedua kelompok ini dimulai setelah adanya pelatihan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pasca dua bulan. Selain persoalan legalitas, Kepala Dinas Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) mengatakan, Pemerintah Kota juga telah membantu kelompok usaha padat karya paving untuk mendapat dukungan permodalan dari BPR Surya Artha Utama. Masing-masing kelompok beranggotakan eman orang akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 15 juta yang akan digunakan kelompok usaha padat karya paving membeli material untuk produksi paving. Peralatan yang akan digunakan oleh kelompok usaha padat karya paving juga akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota hasil *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan Kecamatan Tambaksari menggunakan lahan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebagai lokasi produksi.

Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kecamatan Tambaksari sangat terbatas bahkan bisa dibilang tidak ada selain kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga Kecamatan Tambaksari memanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan lain yang sudah jadi namun masyarakatnya tidak berminat ataupun memilih usaha Rumah Padat Karya lain seperti di Kecamatan Sukolilo. Pada awal Januari 2024 juga bertambah dengan dibentuk satu kelompok usaha padat karya paving masyarakat

Kecamatan Tambaksari di Kecamatan Mulyorejo. Adapun diuraikan pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 2. Kelompok Padat Karya Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari**

No	Lokasi	Tenaga Kerja	Kelompok Kerja
1.	Tambaksari BKTD Jl. Tambaksari No. 11	7	Tambaksari Maju Jaya: 4 Tambaksari Bersama Sejahtera: 3
2.	Tambaksari BKTD Jl. Keputih Tegal Taman (Samping Rusunawa Keputih)	8	Tambaksari Jaya Sentosa: 5 Tambaksari Ploso Dukuh Setro : 3
3.	Tambaksari BKTD Jl. Mulyorejo No. 102 (Belakang Kecamatan Mulyorejo)	5	Tambaksari Karya Sejahtera

Sumber: Kecamatan Tambaksari, Tahun 2024

Dari tabel di atas, tenaga kerja yang terserap di Rumah Padat Karya Produksi Paving Kecamatan Tambaksari sudah cukup banyak dan berencana akan terus berkembang. Meskipun Kecamatan Tambaksari memiliki keterbatasan aset Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan namun masyarakat Kecamatan Tambaksari memiliki masyarakat yang semangat bekerja dan pola pikir yang berkembang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hasil produksi paving-paving nantinya akan digunakan untuk program perbaikan jalan di perkampungan. Karena berurusan dengan anggaran negara, maka kualitas hasil produksi harus bagus. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) juga menggandeng Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) untuk melakukan *quality control*.

Rata-rata hasil produksi setiap kelompok tidak selalu menetap disesuaikan dengan kemampuan setiap kelompok. Dalam setiap bulan masing-masing kelompok mampu memproduksi sekitar 337M<sup>2</sup>. Dalam 1M<sup>2</sup> jumlah pavingnya adalah 44 biji. Jadi hasil rata-rata setiap bulannya masing-masing kelompok mampu memproduksi sekitar 14.828 biji paving/bulan. (Penanggungjawab Kelompok Paving Kecamatan Tambaksari). Sejak diluncurkan pada Juli 2022, kelompok usaha padat karya produksi paving telah menunjukkan hasil yang signifikan, yakni penjualan salah satu kelompok usaha padat karya produksi paving Kecamatan Tambaksari mencapai Rp 6-7 juta pada September 2022. Menurut Adi Gunita, Kepala Dinas Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Mrarga (DSDABM) berdasarkan analisis ekonomi, pendapatan dari Rumah Padat Karya

Produksi Paving dapat menggapai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, tergantung kinerja dari masing-masing kelompok, kapasitas ini bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Dalam jangka pendek, produksi paving kelompok usaha padat karya paving ini akan dibeli Oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pembangunan jalan di Surabaya dengan lebar kurang dari 2 meter. Akan tetapi kedepannya, paving yang diproduksi oleh kelompok usaha padat karya paving masyarakat Kecamatan Tambaksari mungkin bisa dijual ke masyarakat umum karena standarnya sudah sesuai dengan ekspektasi pasar.

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan dan acuan dalam penelitiannya. Penelitian terdahulu ini sangat berpengaruh sebagai perbandingan penelitian penulis saat ini dan penulis sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Wahyudi dengan Judul Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo, menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan teori yang ada, meskipun masih diperlukan peningkatan penyuluhan dan pelatihan yang komprehensif bagi anggota kelompok rumah padat karya dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif agar anggota kelompok rumah padat karya tersebut lebih berdaya dan lebih terlindungi oleh Pemerintah Kota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puttricia dan Prathama (2023) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya *Viaduct by Gubeng* di Kota Surabaya, menunjukkan hasil bahwa tujuan Program Rumah Padat Karya melalui Rumah Padat Karya *Viaduct by Gubeng* belum tercapai dikarenakan 2 dari 9 tujuan pemberdayaan masyarakat yang belum tercapai yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan kehidupan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya relevansi dengan penelitian yang sedang berjalan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya. Meskipun, topiknya serupa namun perbedaan utamanya terletak pada lokasi.

Pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi penuh filosofi dan harapan besar. Yakni, bagaimana masyarakat Kota Surabaya bisa memperoleh pekerjaan dan mendapatkan pendapatan dengan cara gotong royong. Kecamatan Tambaksari yang memiliki keluarga miskin dengan jumlah terbanyak diantara 31 Kecamatan lainnya namun memiliki aset Pemerintah Kota Surabaya yang terbatas untuk dapat dimanfaatkan. Namun masyarakat Kecamatan Tambaksari memiliki antusiasme yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bergabung

pada Rumah Padat Karya Produksi Paving yang memanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dengan judul **“Program Rumah Padat Karya Produksi Paving Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk menginterpretasikan fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang lengkap dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan katakata, melaporkan pandangan terinci yang didapatkan dari sumber narasumber dan dilaksanakan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77) dalam (Fadli, 2021). Lokus penelitian disini adalah Rumah Padat Karya yang terdapat masyarakat Kecamatan Tambaksari yaitu ada di Rumah Padat Kasrya Kecamatan Tambaksari di Jalan Tambaksari No 11, Rumah Padat Kasrya Kecamatan Sukolilo di Jalan Keputih Tegal Taman (Samping Rusunawa Keputih) dan Rumah Padat Kasrya Kecamatan Mulyorejo di Jalan Mulyorejo No. 102 (Belakang Kecamatan Mulyorejo). Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dalam (Fadli, 2021). Wawancara dilakukan dengan 9 orang sebagai subjek penelitian yakni Pihak Kecamatan Tambaksari, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya sebagi OPD Pengampu dan Ketua serta Anggota Rumah Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari. Teknik analisis data dibagi menjadi 4 bagian, yakni: pengumpulan data, kondensasi data, menampilkan data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Rumah Padat Karya Kecamatan Tambaksari yang berlokasi di Jalan Tambaksari No. 11 merupakan Rumah Padat Karya Produksi Paving yang pertama di Kota Surabaya dengan luas lahan 30×25m<sup>2</sup>. Rumah Padat Karya Paving ini diresmikan pada tanggal 18 Mei 2022. Rumah Padat Karya yang merupakan kegiatan produktif untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan aset pemerintah Kota Surabaya yang sasaran utamanya

terhadap masyarakat yang termasuk ke Keluarga Miskin. Kecamatan Tambaksari yang memiliki jumlah Keluarga Miskin terbanyak dibandingkan Kecamatan lain di Kota Surabaya namun Kecamatan Tambaksari tidak memiliki aset Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan sehingga Kecamatan Tambaksari memanfaatkan tempat produksi paving yang sudah jadi di Kecamatan lain, namun masyarakatnya yang tidak berminat atau memilih jenis usaha Padat Karya lainnya. Adapun tempat produksi paving di Kecamatan lain yang dimanfaatkan untuk ditempati masyarakat Kecamatan Tambaksari yaitu di Kecamatan Sukolilo lebih tepatnya di Jalan Keputih Tegal Taman (Samping Rusunawa Keputih) dengan luas lahan  $20 \times 40 \text{m}^2$ . dan di Kecamatan Mulyorejo di Jalan Mulyorejo No. 102 (Belakang Kecamatan Mulyorejo).

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada fokus penelitian terkait tahapan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Tim Delivery (2004) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2013) yang meliputi 1) Seleksi Lokasi/Wilayah 2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat 3) Proses Pemberdayaan Masyarakat 4) Pemandirian Masyarakat. Berikut uraian hasil dan pembahasan penelitian sebagai berikut:

### **1) Seleksi Lokasi atau Wilayah**

Pemilihan Lokasi/Wilayah akan didasarkan pada kriteria yang disetujui antara lembaga, pihak terkait dan masyarakat. Penentuan standar sangat krusial untuk memastikan penetapan lokasi yang terbaik dan tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai harapan menurut Tim Delivery (2004) dalam (Mardikanto dan Soebianto, 2013:125-127). Sejalan dengan (Azizah et al., 2015) yang menyatakan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan harus diperoleh kesepakatan mengenai pemilihan lokasi antara tim fasilitator, aparat pemerintah setempat, masyarakat setempat (perwakilan) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (pengusaha, tokoh masyarakat, aktivis LSM, akademisi, dan lain-lain) Bukan hanya sekedar menghindari gesekan kepentingan atau konflik kepentingan antar seluruh pengampu kepentingan, namun juga menciptakan kolaborasi serta mendapatkan dukungan berupa partisipasi dari seluruh pengampu kepentingan demi kesuksesan program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian penulis dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan, hasilnya menunjukkan bahwa dalam penentuan lokasi Rumah Padat Karya

Produksi Paving memanfaatkan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya. Adapun beberapa kriteria lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai Rumah Padat Karya Produksi Paving yaitu jauh dari permukiman masyarakat sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar karena suara produksi yang bising dan berdebu. Kriteria selanjutnya adalah jalan akses yang memadai dikarenakan sebagai jalan keluar masuk angkutan berat yang membawa bahan produksi paving maupun hasil produksi paving, serta luas lahan yang mencukupi sehingga ada ruang untuk produksi dan lain sebagainya. Aset Pemerintah Kota Surabaya yang terdapat di Kecamatan Tambaksari sangat terbatas bahkan bisa dibilang tidak ada selain Kelurahan dan Kecamatan. Rumah Padat Karya Produksi Paving yang berdiri di Kecamatan Tambaksari hanya terdapat satu yaitu di Jalan Tambaksari No.11. Aset Pemerintah Kota Surabaya yang ada di Kecamatan Tambaksari ini tidak memadai dengan permintaan masyarakat yang masuk untuk mengikuti Program Rumah Padat Karya Produksi Paving ini, sehingga Kecamatan Tambaksari memanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving di Kecamatan lain yang sudah jadi namun masyarakatnya tidak berminat ataupun memilih usaha Rumah Padat Karya lain seperti di Kecamatan Sukolilo Jalan Keputih Tegal Taman (Samping Rusunawa Keputih) dan Kecamatan Mulyorejo Jalan. Mulyorejo No. 102 (Belakang Kecamatan Mulyorejo). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yudi Eko Handono, S.IP, M.IP. selaku Camat Tambaksari:

"...kita kan memang warganya banyak tapi kita tidak punya aset ya jadi sangat terbatas selain kantor kelurahan dan kecamatan, yang ada di kecamatan tambaksari ya itu satu saja yang di No 11 itu juga sebenarnya punyanya PU. Kalau bisa kan menggunakan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya. Karena kurang kita berupaya mencari di kecamatan lain yang sudah jadi lahannya tapi warga kecamatan setempatnya tidak berminat itu yang kita gunakan, yang kita gunakan ada 2 tempat satunya di Sukolilo satunya lagi di Mulyorejo tapi yang menggunakan ya warga Kecamatan Tambaksari. Padat karya paving kan macam-macam persyaratannya dan lumayan susah untuk dipenuhi. Yang pertama jauh dari lingkungan penduduk karena kan bising dan berdebu, kalau di dekat rumah warga nanti diprotes. Kemudian jalan akses yang mudah untuk dilewati untuk kendaraan truck, karena kan harus diangkut ya kan seperti bahan-bahannya pasir, semen kan juga perlu armada pengangkut. Dan ada minimal luas lahan berapa kali berapa karena untuk produksi dan lain sebagainya kan butuh space. Terus mungkin dari beberapa tempat yang mungkin bisa memenuhi dari segi luasan, jarak maupun lahannya PU yang mungkin digunakan."(Hasil wawancara pada tanggal 13 Maret 2024).

Pada tahapan ini juga melibatkan beberapa pihak antara lain Kecamatan setempat, Kelurahan setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat yang mewakili masyarakat, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang

mengetahui spesifikasi lahan yang sesuai untuk dimanfaatkan Rumah Padat Karya Produksi Paving, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan (DPRKPP) sebagai membangun fasilitas bangunan Rumah Padat Karya serta memfasilitasi pemasangan listrik dan tandon air, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai verifikasi lahan Rumah Padat Karya Produksi Paving. Sejalan dengan hal tersebut disampaikan oleh Bapak. Agus Yudiwibowo, ST, MT selaku Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya serta Estyningtyas Puspita Alfiany, ST selaku staff bidang Jalan dan Jembatan DSDABM:

"...penentuan lokasi Rumah Padat Karya ini melibatkan kecamatan dan kelurahan setempat, serta LPMK yang mewakili masyarakat. Lokasi yang digunakan untuk kegiatan Padat Karya Produksi Paving sesuai dengan syarat antara lain jauh dari permukiman warga dan akses jalan terpenuhi. Selain itu bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan serta Pertahanan (DPRKPP) untuk membangun fasilitas bangunan RPK, memfasilitasi pemasangan listrik dan tandon air. Serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan verifikasi lahan RPK produksi paving." (Hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2024).

Dalam analisisnya, seleksi lokasi atau wilayah yang dilakukan sudah maksimal dan sudah sesuai dengan teori yaitu memperhatikan kriteria yang ditetapkan yang telah disepakati dengan lembaga atau instansi yang terkait sehingga dapat menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan maksimal.

## **2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat**

Tim Delivery (2004) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), sosialisasi dapat diartikan sebagai usaha untuk menyampaikan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin dialog dengan masyarakat. melalui sosialisasi, hal ini akan membantu menumbuhkan pemahaman masyarakat serta pihak terkait terhadap rencana program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi sangat penting dikarenakan akan mengikat ketertarikan atau kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan.

Berdasarkan penelitian penulis dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan, Sosialisasi kepada Masyarakat Kecamatan Tambaksari terkait pengenalan program padat karya, diberikannya penawaran hingga teknis pelaksanaan jenis usaha yang dipilih khususnya dalam hal ini terkait produksi paving dari awal sampai akhir seperti tata cara klaim dan pembayaran serta resiko pekerjaan. Hal ini tentunya sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Widjaja (2008), yang menyatakan bahwa sosialisasi program merupakan proses mengkomunikasikan program-program kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu. Selama proses sosialisasi program pemberdayaan masyarakat, tentunya juga melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Sumber Daya air dan Bina Marga, Koperasi dan pihak lainnya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syaiful Anas selaku Koordinator Kelompok Kerja Paving Kecamatan Tambaksari:

"...Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sumber Daya air dan Bina Marga, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat yang minat dalam pelatihan paving. Yang disampaikan Pemerintah Kota melalui Dinas sangat jelas terkait produksi awal sampai akhir. Tata cara klaim dan pembayaran lalu kekompakan tim yang terpenting. Pemerintah Kota hanya memfasilitasi lahan, mesin, material dan lain-lain, soal penghasilan itu tergantung dari warga atau tim."(Hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2024).

Meskipun, sosialisasi telah dilakukan namun untuk bisa menyerap atau tidaknya tergantung dari masyarakat itu sendiri hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sutaryo, (2004) yang menyatakan sosialisasi adalah proses mengenalkan suatu sistem kepada seseorang dan membiarkan orang tersebut menentukan tanggapan dan tanggapannya. Kendala dari masyarakat keluarga miskin yaitu malas untuk bekerja keras dan hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah. Sehingga untuk lebih menyerap lagi tenaga kerja diperlukan sebuah strategi yang tidak berhenti pada sosialisasi terkait pemahaman sebuah program saja namun juga bagaimana masyarakat mampu merubah pola pikirnya. Hal ini sejalan dengan Dalam (Sudrajat, 2020) menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat, kegiatan komunikasi dan sosialisasi tidak hanya sebatas pada penyampaian ilmu pada tataran pemahaman dari “ketidaktahuan menuju pengetahuan”, dari “tidak memahami menjadi memahami”, namun lebih dari itu juga mencakup aspek perasaan dan tindakan. Jadi di akhir kegiatan ini, menuntut adanya perubahan sikap yaitu dari pemahaman “percaya” menjadi termotivasi untuk mengambil tindakan. Hal ini juga diperkuat oleh (Agustana, 2020; Sarte et al., 2021) Jadi, strateginya ialah mencari cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perubahan. Terlebih lagi, jika penyelenggara program memberikan bimbingan informal melalui kegiatan seperti kunjungan rumah dan diskusi kelompok, hal ini akan mendorong bergulirnya program di masyarakat. Maka dapat disimpulkan sosialisasi yang diberikan oleh Pihak Kecamatan Tambaksari maupun Dinas Sumber Daya air dan Bina

Marga sudah cukup baik karena informasi yang diberikan tersampaikan kepada masyarakat Kecamatan Tambaksari dan masyarakat Kecamatan Tambaksari bersedia berpartisipasi dalam Rumah Padat Karya Produksi Paving namun masih diperlukan lagi suatu usaha atau strategi untuk dapat lebih menyerap lagi tenaga kerja dari masyarakat keluarga miskin sehingga tujuan dari Program Rumah Padat Karya yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kota Surabaya dapat tercapai.

### **3) Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemandirian masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka Tim Delivery (2004) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2013). Hal ini dilihat dari langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti identifikasi dan kajian potensi wilayah Rumah Padat Karya Produksi Paving dilakukan dengan saling bekerjasama dan berkoordinasi antara Pemerintah Kota dan LPMK sebagai perwakilan masyarakat.

Pada awal kegiatan, masyarakat Kecamatan Tambaksari membentuk Kelompok Usaha dengan pemilihan ketua berdasarkan musyawarah masing-masing kelompok namun tetap berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan Tambaksari dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk diberikan arahan. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum, menyebutkan 1 (satu) kelompok usaha paling sedikit menyerap 6 (enam) keluarga miskin sebagai tenaga kerja. Dalam pembentukan kelompok juga membahas terkait Standar Operasional Prosedur yang akan berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. Hal ini didukung oleh pernyataan dari (Hadiyanti, 2008) yang menyatakan bahwa kelancaran suatu program pemberdayaan yang ada di masyarakat sasaran sangat ditentukan oleh ada tidaknya kelompok dalam kegiatan tersebut karena keberadaan suatu kelompok membuat ikatan-ikatan, baik secara fisik maupun emosional. Namun kendala dalam pembentukan kelompok ini, terkadang sudah terbentuk kelompok namun di tengah-tengah terdapat anggota yang keluar, untuk mencari penggantinya ini susah (Banseng et al., 2021; Salamah et al., 2022). Sasaran utama program rumah padat karya adalah kepada masyarakat yang termasuk ke dalam Kategori Keluarga Miskin namun kendala dari masyarakat keluarga miskin yaitu malas untuk bekerja keras dan hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah.

Namun terkadang ada yang niat bekerja namun tidak bisa mengikuti program rumah padat karya paving karena tidak termasuk ke dalam Kategori Keluarga Miskin. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian data maupun ketidaktepatan sasaran dari Keluarga Miskin. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Syaiful Anas Selaku Koordinator Kelompok Usaha Padat Karya Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari:

"...Pemerintah Kota memberikan kebebasan dalam pembentukan kelompok. Tim-timnya sendiri yang menunjuk salah satu anggota sesuai dengan kesepakatan tim. Kita juga menerapkan aturan kerja atau SOP, setiap Rumah Padat Karya Paving mempunyai SOP sendiri-sendiri. Namun terkadang, sudah dibentuk ya kelompoknya tapi di tengah-tengahnya anggotanya itu keluar jadi kita nyari anggota baru lagi. Nah sasaran utamanya kan memang dari Keluarga Miskin ya, tapi kadang itu dirumahnya sudah ada ya stiker merah tapi di data aplikasi kecamatan itu tidak termasuk ke Keluarga Miskin. Kadang juga ada yang nganggur ya mbak, tapi emang rumahnya besar cuman kadang kan ada yang numpang orang tua atau mertua gitu, tapi kan orang ini ga ngapa-ngapain dirumah cuman ya gabisa dimasukkan karena bukan termasuk ke Keluarga Miskin. Jadi kendalanya, anggotanya harus dari yang Keluarga Miskin tapi yang dari Keluarga Miskin ini banyak yang tidak mau kerjanya hanya mengandalkan bantuan saja, ada yang niat kerja tapi terhalang dengan tidak termasuk ke Keluarga Miskin". (Hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2022) yang menyatakan, salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu, sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noerkaisar, 2021) bahwa mengacu pada Pasal 8 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berkenaan pengurusan masyarakat pra sejahtera, dijelaskan semestinya verifikasi dan validasi data dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.

Setelah peran masyarakat untuk melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat sudah ditetapkan, agen pemberdaya selanjutnya mendukung masyarakat secara kolaboratif mengembangkan rencana pelaksanaan kegiatan (Andayani et al., 2018). Dalam proses pemberdayaan, masyarakat Kecamatan Tambaksari diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Pelatihan ini terkait cara mengolah adonan yang sesuai dengan standart K-175 yang telah ditetapkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan juga cara untuk mengoperasikan mesin. Dengan adanya pelatihan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, kelompok usaha padat karya paving Kecamatan

Tambaksari mampu untuk memproduksi paving secara mandiri serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ( Nengsih et al., 2020; Widiyanto Delfian et al., 2021) yang menyatakan pemberian pelatihan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.



**Gambar 1. Pelatihan Kelompok Padat Karya Produksi Paving**

Sumber: Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga, 2024

Dalam menerapkan rencana kegiatan yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Tatang, 2011) bahwa fasilitasi seringkali disandingkan dengan pendampingan yaitu bentuk dukungan baik dalam bentuk tenaga, dana, peralatan dan metode dalam berbagai program pembangunan dan usaha pengurangan kemiskinan. Dalam hal ini Kelompok Usaha Paving mendapatkan bantuan modal yang pada awalnya dari PT. BPR SAU namun setelah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 modal kelompok usaha bermitra dengan Koperasi. Selain itu Kelompok Usaha Produksi Paving juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja melalui mekanisme asuransi sosial dan Baznas Kota Surabaya yang memberikan santunan sebesar Rp. 50.000 per hari selama 1 (satu) bulan setelah pembentukan kelompok. Kelompok Usaha Paving masyarakat Kecamatan Tambaksari juga mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga berupa mesin cetak dan mixer paving. Mesin yang digunakan oleh Kelompok Usaha Produksi Paving masih menggunakan mesin yang manual sehingga memerlukan ekstra tenaga manusia. Mesin juga sering mengalami kerusakan, sehingga menjadi salah satu faktor hasil produksi tidak bisa maksimal atau hasil cetakan tidak sempurna. Terdapat kendala lain dalam

pemberdayaan masyarakat yaitu dinamika kelompok yang terkadang anggota tidak disiplin dalam bekerja namun dalam hal ini sudah diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Terkait pemasaran hasil produksi sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya, hasil produksi paving akan dibeli oleh Koperasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sumodiningrat Mardikanto dan Soebianto (2012) disebutkan bahwa pemberdayaan adalah usaha untuk memberikan peluang dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka mempunyai akses terhadap sumber daya berupa modal, teknologi, informasi serta jaminan pemasaran sehingga masyarakat mampu mengembangkan usahanya dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih baik serta perluasan kesempatan bekerja untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Handrianto et al., 2021; Nengsih et al., 2023).

Setelah rencana yang disusun dijalankan, maka setelah itu akan dilakukan pemantauan dan hasil kegiatan yang sedang berjalan secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh tahapan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME dapat diartikan sebagai proses evaluasi, peninjauan dan pemantauan kegiatan, baik proses (pelaksanaan maupun hasil serta dampaknya, sehingga dapat disusun proses perbaikan apabila diperlukan dalam Mardikanto dan Soebianto (2013). Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, selama pelaksanaan Rumah Padat Karya Produksi Paving berjalan, proses dan hasilnya selalu dipantau. Kontrol terhadap pekerjaan juga dilakukan sehingga hasil produksi kelompok usaha produksi paving menghasilkan hasil produksi paving yang telah ditetapkan standarnya yaitu K-175. Apabila ada kekurangan dalam pekerjaan dapat diberikan pengarahan secara langsung.

**Tabel 3. Hasil Produksi Paving Kelompok Usaha Masyarakat Kecamatan Tambaksari**

No	Kelompok Kerja	Bulan	Hasil Produksi	Omzet
1.	Tambaksari Bersama Sejahtera	Januari	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Februari	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Maret	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		April	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Mei	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Juni	500m <sup>2</sup>	15.535.000
		Juli	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		Agustus	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		September	337m <sup>2</sup>	10.580.000

		Oktober	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		November	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		Desember	120m <sup>2</sup>	7.400.000
2.	Tambaksari Maju Jaya	Januari	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Februari	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Maret	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		April	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Mei	674m <sup>2</sup>	21.788.000
		Juni	500m <sup>2</sup>	15.535.000
		Juli	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		Agustus	337m <sup>2</sup>	10.580.000
<b>No</b>	<b>Kelompok Kerja</b>	<b>Bulan</b>	<b>Hasil Produksi</b>	<b>Omzet</b>
		September	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		Oktober	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		November	337m <sup>2</sup>	10.580.000
		Desember	337m <sup>2</sup>	10.580.000
3.	Tambaksari Ploso Dukuh Setro Jaya	Oktober	324m <sup>2</sup>	10.580.000
		November	337m <sup>2</sup>	10.880.000
		Desember	100m <sup>2</sup>	4.600.000
4.	Tambaksari Jaya Sentosa	November	337m <sup>2</sup>	10.880.000
		Desember	280m <sup>2</sup>	11.460.000

Sumber: Kecamatan Tambaksari, Januari 2024

Dari tabel diatas, hasil yang diperoleh akan dibagi dengan anggota tim sesuai dengan kesepakatan bersama. Dapat dilihat pendapatan yang dihasilkan dari Rumah Padat Karya Produksi Paving bisa mencapai upah minimum Kabupaten/Kota dengan setiap anggota bisa mendapatkan Rp. 6.000.000 rupiah. Hal ini tentu saja tergantung dari kinerja masing-masing kelompok namun juga diimbangi dengan mesin yang memadai.

#### **4) Pemandirian Masyarakat**

Tahapan akhir dalam pemberdayaan masyarakat adalah pemandirian masyarakat. Menurut Tim Delivery (2004) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2013) menjelaskan bahwa prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat. Pemandirian masyarakat dapat berupa mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu dalam mengelola kegiatannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, faktor internal merupakan bentuk *self organizing* yang artinya masyarakat mampu menjalankan usahanya sendiri dengan baik. sedangkan faktor eksternalnya adalah tim pendamping. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap

selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu menjalankan kegiatannya secara mandiri. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handrianto et al., 2019; Haryono & Silviana, 2023), bahwa yang lebih utama adalah pendampingan ini tidak hanya selesai pada proses pelaksanaan serta evaluasi saja. Tim fasilitator serta Pemerintah juga memotivasi masyarakat untuk mampu lebih mandiri dalam berbagai aspek pekerjaan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya memberikan dukungan fisik dalam pelaksanaan program namun juga mendukung dalam membangun keterampilan masyarakat untuk mampu mengelola secara mandiri kegiatan-kegiatan tersebut di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, bahwa kelompok usaha padat karya paving sudah mampu dan dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usahanya sendiri. Dikatakan mandiri dalam artian secara mental timnya kompak dalam menyelesaikan kendala seperti kendala mesin yang ringan, masalah dinamika kelompok dan lain sebagainya. Setiap Rumah Padat Karya Produksi Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari juga sudah menanggung sendiri biaya seperti biaya listrik yang dibagi dalam setiap kelompok. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Staff Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tambaksari:

"...yang di Tambaksari dan di Keputih ini insyaallah sudah mampu mengelola sendiri. Namun kita tetap mengcover kebutuhan mereka, semangat mereka kita bantu. Per bulan kita juga tetap memantau terkait klaim produksi pavingnya, terus kendala-kendala apa di lapangan, masalah-masalah yang di lapangan, kita juga ada whatsapp grup jadi masalah apapun itu yang terkendala kita bilang ke anggota untuk jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan di grup jadi kalau ada apa-apa kita bisa bantu, baik masalah teknis di lapangan, personil atau perorangnya kita siap membantu". (Hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2024).

Meskipun sudah dikatakan mandiri, baik dari pihak Kecamatan Tambaksari maupun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga selalu memantau dengan terus memberikan motivasi kepada kelompok Usaha Padat Karya Paving Masyarakat Kecamatan Tambaksari yang bertujuan untuk membentuk mental baik individu maupun tim sehingga mampu lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya dan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Pemberdayaan masyarakat Rumah Padat Karya Produksi Paving juga mampu meningkatkan kreativitas serta keterampilan masyarakat dapat dilihat dari masyarakat memiliki sertifikasi kerja dari ITS karena mereka sempat ikut pelatihan di ITS dan seringkali mengikuti *event* terkait Program Pemerintah Kota Surabaya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Melalui Program Rumah Padat Karya Produksi Paving yang dianalisis menggunakan tahap-tahap pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dari empat tahap pemberdayaan yang dilaksanakan, tiga tahap pemberdayaan telah dilaksanakan dengan baik yaitu seleksi lokasi atau wilayah, sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan pemandirian masyarakat sedangkan tahapan proses pemberdayaan masyarakat masih kurang baik.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu dalam Sosialisasi, meskipun informasi terkait program tersampaikan dengan baik namun harus juga memperhatikan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat. Dapat dilakukan dengan kunjungan ke rumah yang memberikan diskusi kelompok dengan masyarakat. Dari hal ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengubah persepsi bahwa untuk meningkatkan taraf hidup diperlukan untuk bekerja keras bukan hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah. Dalam meningkatkan dinamika kelompok sehingga setiap anggota dapat disiplin dalam melakukan pekerjaan bisa dengan memberikan *reward* bisa seperti penghargaan yang bersifat non-finansial berupa sertifikat atau pengakuan publik sehingga setiap anggota kelompok bisa lebih bersemangat baik dalam melakukan pekerjaannya ataupun menaati aturan yang ada. Tidak terfokus kepada sasaran yang hanya termasuk kedalam Kategori Keluarga Miskin, namun juga dapat menggunakan opsi untuk masyarakat umum lalu membantu untuk dimasukkan ke dalam Kategori Keluarga Miskin karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketidaksesuaian data maupun ketidaktepatan sasaran akan terus terjadi. Selain itu, untuk lebih mendukung pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tambaksari melalui Program Rumah Padat Karya, Pemerintah Kota Surabaya ataupun hasil dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat membantu memfasilitasi mesin yang lebih baik. Selain mengurangi kerusakan mesin yang terjadi, pekerjaan kelompok usaha juga menjadi lebih

ringan serta hasil produksi yang dihasilkan dapat lebih maksimal sehingga memenuhi standar yang ditetapkan dan Kelompok Usaha Padat Karya Paving dapat meningkatkan hasil pendapatannya yang juga dapat menaikkan UMK Kota Surabaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). CV Syakir Media Press.
- Adawiyah, S. El. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43–50.
- Andayani, F., Perbawasari, S., Si, M., Ari, F. X., Prastowo, A., Sos, S., & I, M. (2018). *Organizing the Learning Day Program as a Local Community Empowerment Program Learning Day Program as an Effort to Empower the Jatinangor Local Community*. 17(3), 366–374.
- Azizah, R. N., Zauhar, S., & Soeaidy, M. S. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(03), 203–2012. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.7>
- Banseng, S., Sandai, R., Handrianto, C., & Rasool, S. (2021). Language of strata and expression in construction of sampi amongst iban community in malaysia. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 4(3), 417-427. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5169017>
- Delfian Widiyanto, Istiqomah, A., & Yasnanto. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra*, 02(01), 26–33.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Fadhilah, A., & Wahyudi, K. E. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 198–210. <https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/112>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Febrianza, M. D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021. *JOM FISIP*, 10(1), 1–23.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.
- Handrianto, C., Jusoh, A. J., Goh, P. S. C., Rashid, N. A., & Saputra, E. (2021). Teachers' self-efficacy as a critical determinant of the quality of drug education among Malaysian students. *Journal of Drug and Alcohol Research*. 10(3).
- Handrianto, C., & Salleh, S. M. (2019). The environmental factors that affect students from outside Java island to choose Yogyakarta's bimbel. *International Journal of Environmental and Ecology Research*, 1(1), 27-32. Retrieved from: <http://www.environmentaljournal.in/article/view/5/1-1-14>
- Haryono, D., & Silviana, E. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Tunai Desa Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 441–453.
- Harlik, H., Amir, A., & Hardiani, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1500>
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(2), 79–91. <https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>

- Kurnia Malta, Z., & Sutikno, S. (2020). Analisis Karakteristik Tingkat Kesejahteraan di Kota Surabaya Menggunakan Metode Pohon Klasifikasi. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.46867>
- Lestari, A. D. I., & Yamin, M. N. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Ulat Sutera Di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Eprints Universitas Negeri Makassar*. <http://eprints.unm.ac.id/20518/1/JURNAL ADIAN.pdf>
- Mardikanto, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- M., & Prathama, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 95–110.
- Nengsih, Y. K., Husin, A., Handrianto, C., Rantina, M., & Arahmat, R. (2023). *Pengelolaan pembelajaran program pendidikan luar sekolah*. Bening Media Publishing.
- Nengsih, Y. K., Rantina, M., & Nurrizalia, M. (2020). Prototype model taman bacaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif creative economic-based community reading park prototype model. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 115-123.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*. 24(1), 45–53.
- Salamah, U., Rumadan, I., Handrianto, C., & Alfurqan, A. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH–Jurnal Kajian Gender*, 14(1), 45-56. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i1.5338>
- Sarte, N. M. R., Santiago, B. T., Dagdag, J. D., & Handrianto, C. (2021). Welcome back: The return of college dropouts to school. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 8(2), 140-149. <https://doi.org/10.36706/jppm.v8i2.15386>
- Setijaningrum, E., Ilmu, F., Politik, I., Airlanga, U., Surabaya, J. A., & E-mail, I. (2017). Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya Integrated program

design to overcome poverty in Surabaya. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(1), 13–19.

Surabaya.go.id. (2023, 22 Desember). Surabaya Juara 1 Penyelenggaraan Jalan Dari Kementerian PUPR, Bawa Pulang Proyek Pembangunan Jalan Senilai Rp 40 Miliar. Diakses pada 14 Februari 2024, dari <https://surabaya.go.id/id/berita/77816/surabaya-juara-1-penyelenggaraan-jalan-dari-kementerian-pupr-bawa-pulang-proyek-pembangunan-jalan-senilai-rp-40-miliar>

Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. In *NilaCakra Publishing House, Bandung*. [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf)

Tarbiyah, F. (2020). *Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan*. 2(1), 9–16.